

# **ANALISIS FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Evi Flora Harianta Sirat**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
floraharianta@yahoo.com

**Pani Akhiruddin Siregar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
siregarpaniakhiruddin@yahoo.co.id

**Kadri Bancin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
kadribancin15@gmail.com

## **Abstract**

This research aims to analyze deeply the influence of Money Supply, BI Rate, CAR and FDR to NPF Sharia Banking Indonesia. Quantitative data types in the form of monthly time-series data From The Financial Ratio Report of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit published by Sharia Banking Directorate, Bank Indonesia and the Bank Licensing and Banking Information Department, Indonesia Financial Services Authority through Sharia Banking Statistics Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority from January 2006 to January 2018. The results showed: (1) A regression model on the independent variable simultaneously affects the dependent variable, so that the independent variable regression model can be used to predict the dependent variable; and (2) Money supply variable influential positive and significant to NPF variable; BI Rate variable influential negative and insignificant to NPF variable; CAR and FDR variable has no influential positive and insignificant to NPF variable.

**Keywords:** Money Supply, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Sharia Banking.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI *Rate*, CAR dan FDR terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. Jenis data kuantitatif berupa data runtun waktu (*time series*) bulanan dari Laporan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia serta Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lewat Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (SPS-BI/OJK) periode Januari 2006 hingga Januari 2018. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (2) Variabel JUB berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NPF; variabel BIR

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF; variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.

**Kata kunci:** Jumlah Uang Beredar (JUB), Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI Rate), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Perbankan Syariah.

## **Pendahuluan**

Pada awal 1997 tidak banyak pihak (termasuk di Indonesia) yang memperkirakan Indonesia termasuk salah satu negara Asia yang secara ekonomik rentan terhadap serangan para spekulan mata uang. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunnya angka kemiskinan rata-rata sejak periode 1970-an memperkuat optimisme bahwa Indonesia bakal kuat menghadapi ancaman krisis moneter yang melanda kawasan Asia tersebut. Dengan menunjuk pada indikator-indikator makroekonomi Indonesia, Bank Dunia bahkan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berada di dalam kondisi siap menghadapi krisis moneter. Optimisme serupa masih diperlihatkan pemerintah Indonesia ketika pada minggu kedua Mei 1997 mata uang Thailand, Baht mulai menjadi sasaran para spekulan. Optimisme menjadi berbalik ketika Juli 1997 efek menular cepat dirasakan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kuatnya tekanan yang diduga dilakukan oleh para spekulan mata uang asing memaksa Bank Sentral Thailand pada 2 Juli 1997 mengambangkan nilai tukar Baht. Krisis negara-negara ASEAN berlanjut dengan turunnya nilai mata uang Filipina (Peso), Malaysia (Ringgit) dan Indonesia (Rupiah). Krisis moneter di Indonesia kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi.<sup>1</sup>

Pandangan tentang penyebab krisis ekonomi di Indonesia sangat beragam. Ekonom klasik, seperti Krugman melihat krisis ekonomi yang melanda Asia, khususnya Indonesia disebabkan karena faktor domestik antara lain praktik kapitalisme kroni (*crony capitalism*) dan lemahnya struktur keuangan yang berkaitan dengan kebijakan makroekonomi. Sebaliknya, ekonom Keynesian, seperti Kindlebeger melihat krisis itu terjadi karena sentimen pasar keuangan yang menyebabkan kepanikan dan menimbulkan proses penularan pada sistem ekonomi nasional. Sementara J. Soedradjat Djiwandono melihat bahwa krisis yang melanda

---

<sup>1</sup>Lilik Salamah, *Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th. XIV, No. 2, April 2001, h. 65-66.

Asia, khususnya Indonesia karena kombinasi kekuatan dari luar serta lemahnya struktur keuangan dan ekonomi domestik.<sup>2</sup>

Krisis yang terjadi sejak pertengahan 1997 berdampak Indonesia dan sebagian beberapa negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi yang disebabkan beberapa faktor baik bersifat eksternal maupun internal. Penarikan dana secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh masyarakat dan ataupun para investor asing yang didorong oleh pesimisme prospek perekonomian regional dengan segera melemahkan mata uang rupiah secara drastis. Gelombang *capital outflow* tersebut kemudian diikuti oleh aksi beli dolar penduduk domestik berakibat nilai rupiah semakin terpuruk. Melemahnya nilai rupiah melalui berbagai transmisi menimbulkan dampak kurang menguntungkan kepada sektor-sektor perekonomian dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Sementara itu, fluktuasi nilai tukar tampaknya semakin sulit diprediksi dan cenderung *overshoot*, sehingga untuk mengerem laju spekulasi dilakukan pengetatan moneter dengan konsekuensi suku bunga tinggi. Meningkatnya suku bunga umum secara paralel kemudian mendorong ke atas bunga pinjaman atau biaya modal bagi perusahaan-perusahaan sektor riil. Kenaikan biaya modal ini pun dengan sendirinya mengganggu perencanaan investasi maupun produksi jangka panjang yang akhirnya berpengaruh pada menurunnya penawaran agregat.<sup>3</sup>

Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mensinyalir adanya krisis perbankan adalah rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu, menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat pembiayaan bermasalah merupakan hal penting dan substansial bagi stabilitas keuangan dan manajemen bank. Sektor investasi merupakan sektor penting yang berada dalam aliran sirkuler uang dalam perekonomian. Sektor investasi ini merupakan penghubung langsung antara lembaga keuangan dan sektor riil, yakni sektor barang dan jasa. Jika tingkat rasio atau pembiayaan bermasalah tinggi, maka bank akan mempersulit masyarakat yang membutuhkan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso, *Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor Riil*, Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 1998, h. 132.

dana karena bank akan lebih berhati-hati dalam praktik penyaluran pembiayaan perbankan<sup>4</sup>, khususnya perbankan syariah.

## **Kajian Literatur**

### **Perbankan Syariah Indonesia**

Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah sistem yang digunakan. Dengan tidak menggunakan sistem bunga terbukti di saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, perbankan syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis dan terbukti betapa besar efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga perbankan konvensional, sehingga memporak porandakan hampir semua aspek perekonomian dan sosial politik negara akibat penerapannya terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran dan kemiskinan.<sup>5</sup> Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menjalankan peranannya selaku perantara keuangan yang bermakna perbankan syariah menjalankan dua fungsi utama bank, yakni menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit/pembiayaan.<sup>6</sup>

Perbankan syariah dan perbankan konvensional bukanlah sistem yang berdiri sendiri dan terlepas dari sistem perbankan global dan tidak boleh bersinggungan dengan sistem keuangan konvensional. Perbankan syariah harus dilihat dari sistem keuangan global dan harus dipandang pelengkap dari sistem keuangan konvensional. Tidak ada larangan menurut ketentuan syariah bahwa suatu bank syariah melakukan hubungan korespondensi dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan usaha. Hal yang mutlak dilarang adalah bahwa bank syariah tidak diperkenankan untuk ikut bersama-sama dengan bank konvensional melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah.<sup>7</sup>

Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh

---

<sup>4</sup>Rika Lidyah, *Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal I-Finance, Vol. 2, No. 1, Juli 2016, h. 2.

<sup>5</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 6.

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, h. 42.

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 38.

bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosiokultural di mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri sesuai cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah yang diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.<sup>8</sup>

### **Jumlah Uang Beredar (M1)**

Masyarakat mengenal uang sebagai uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan uang giral dengan kata lain uang yang berada di tangan masyarakat dan siap dibelanjakan setiap saat biasanya dalam jumlah uang terlalu besar. Uang tunai disebut uang kartal atau *currency*. Sedangkan uang kartal adalah uang kertas dengan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas moneter.<sup>9</sup>

Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah). Sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valuta asing serta giro dalam valuta asing) dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Faktor yang mempengaruhi uang beredar adalah Aktiva Luar Negeri Bersih

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 99-100.

<sup>9</sup>Fadli Ferdiansyah, *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1), Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Suku Bunga Deposito Terhadap Tingkat Inflasi*, Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011, h. 49.

(*Net Foreign Assets/NFA*) dan Aktiva Dalam Negeri Bersih (*Net Domestic Assets/NDA*). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Central Government/NCG*) dan Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk pinjaman yang diberikan.<sup>10</sup>

### **Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (*BI Rate*)**

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yakni *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan *BI Rate*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai Bank Sentral dan merupakan *Best Practice Internasional* dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.<sup>11</sup>

Nama lain dari *BI Rate* adalah tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Harga merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual untuk barang atau jasa ditempat produksi atau di dalam aktivitas usaha. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar kalau terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti.<sup>12</sup>

### ***Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperhatikan modal yang mencukupi kemampuan manajemen bank

---

<sup>10</sup>Lebih jelasnya lihat situs resmi Bank Indonesia di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1996, h. 76.

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank<sup>13</sup> atau CAR adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. CAR memperlihatkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modalnya. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko. CAR juga menjadi indikator untuk melihat tingkat efisiensi dana modal bank yang digunakan untuk investasi.<sup>14</sup>

### ***Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Rasio FDR dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK). Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Jika FDR suatu bank semakin tinggi, maka digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.<sup>15</sup> Pengendalian likuiditas bank adalah persoalan dilematis yang artinya jika bank menghendaki untuk memelihara likuiditas tinggi, maka profit akan rendah. Sebaliknya, jika likuiditas rendah, maka profit menjadi tinggi. Bank yang likuiditasnya tinggi, aktiva relatif lebih rendah secara umum dan porsi dana yang tertanam lebih besar pada aktiva jangka panjang. Dengan demikian, FDR adalah rasio untuk mengukur likuiditas bank dari perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima.<sup>16</sup>

### ***Non Performing Financing (NPF)***

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan *Non Performing Loan* disebut NPL dalam perbankan konvensional dan pembiayaan bermasalah dikenal dengan *Non Performing Financing* disebut NPF pada perbankan syariah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian

---

<sup>13</sup>Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, h. 519.

<sup>14</sup>Slamet Riyadi, *Banking Asset & Liability Management*, LPFE-UI, Jakarta, 2003, edisi ke-1, h. 142.

<sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h. 55.

<sup>16</sup>Taswan, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010, edisi 2, h. 245.

kolektibilitas kredit digolongkan pada kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>17</sup> Dengan demikian, jika pembiayaan yang disalurkan bank banyak yang bermasalah (macet), maka tentunya bank akan sangat menderita. Pertama, pendapatan margin menurun. Kedua, laba menurun. Ketiga, mengganggu likuiditas bank. Keempat, reputasi bank rusak. Kelima, alokasi sumber daya manusia (SDM). Keenam, alokasi waktu.<sup>18</sup>

### **Model Penelitian**

Populasi penelitian penulis peroleh dari publikasi Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia serta Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia lewat Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (SPS-BI/OJK) melalui situs resminya di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). dan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) bulanan periode Januari 2006 hingga Januari 2018 yang perhitungannya dibantu dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), sehingga diperoleh sampel sebanyak 145 data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif disebut juga metode kuantitatif (*scientific paradigm*/paradigma ilmiah), yakni data dalam bentuk angka-angka. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian), sehingga data yang terdiri dari angka-angka dianalisis berdasarkan prosedur statistik.<sup>19</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata sebuah kelompok data (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah.

---

<sup>17</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, LPFE-UI, Jakarta, 2005, edisi ke-5, h. 358.

<sup>18</sup>Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, edisi revisi, cetakan ke-12, h. 317.

<sup>19</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 38.

**Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JUB	145	2018510.00	5419165.05	3643910.4503	899015.23667
BIR	145	5.00	775.00	216.3586	263.04303
CAR	145	10.26	43.86	15.8332	5.12951
FDR	145	77.93	112.25	94.2185	6.70093
NPF	145	2.22	6.63	4.1917	1.11790
Valid N (listwise)	145				

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, N menunjukkan jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 145 data. Periode data dari Januari 2006 hingga Januari 2018 dengan penjelasan:

1. Variabel terikat (dependen) penelitian ini adalah NPF yang mempunyai nilai minimum sebesar 2,22 dan nilai maksimumnya sebesar 6,63. Nilai mean sebesar 4,1917 serta standar deviasi sebesar 1,11790 yang bermakna nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.
2. Variabel bebas (independen) penelitian ini JUB, BIR, CAR dan FDR.
  - a. Nilai minimum variabel JUB sebesar 2018510,00 dan nilai maksimumnya sebesar 5419165,05. Diketahui nilai mean sebesar 3643910,4503 serta standar deviasi sebesar 899015,23667 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.
  - b. Nilai minimum variabel BIR sebesar 5,00 dan nilai maksimumnya sebesar 775,00. Diketahui nilai mean sebesar 216,3586 serta standar deviasi sebesar 263,04303 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan

penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

- c. Nilai minimum variabel CAR sebesar 10,26 dan nilai maksimumnya sebesar 43,86. Diketahui nilai mean sebesar 15,8332 serta standar deviasi sebesar 5,12951 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.
- d. Nilai minimum variabel FDR sebesar 77,93 dan nilai maksimumnya sebesar 112,25. Diketahui nilai mean sebesar 94,2185 serta standar deviasi sebesar 6,70093 yang artinya nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

### Uji Ketepatan Letak Koefisien Determinasi R Square

Koefisien determinasi R Square ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Dari Tabel 2 di bawah, nilai R-nya sebesar 0,346 sebagai nilai korelasi berganda yang bermakna variabel bebas memiliki keeratan hubungan dengan variabel terikat. Sedangkan nilai R Square sebesar 0,120 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna 12,00% dari variasi variabel NPF mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sedangkan sisanya sebesar 88,00% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model.

**Tabel 2 Hasil Uji R Square**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.346 <sup>a</sup>	.120	.095	1.06352

a. Predictors: (Constant), JUB, BIR, CAR, FDR

b. Dependent Variable: NPF

Sumber: Data sekunder yang diolah.

### Uji F

Uji F (Fisher) disebut juga uji *Analysis of Variance* (ANOVA) digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara serempak. Uji F ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Analisis dan kesimpulan dari Tabel 3 di bawah,  $H_0$  tidak dapat diterima (ditolak) dan  $H_a$  dapat diterima (tidak dapat ditolak). Sebab,  $F_{hitung}$  sebesar 4,776 lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 2,44 dan nilai Sig. sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini bermakna model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat.

**Tabel 3 Hasil Uji F**

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.606	4	5.401	4.776	.001 <sup>b</sup>
	Residual	158.351	140	1.131		
	Total	179.957	144			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), JUB, BIR, CAR, FDR

Sumber: Data sekunder yang diolah.

### Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya dan bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung (variabel terikat).

**Tabel 4 Hasil Uji t**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.199	1.667		1.271	.206
	JUB	4.213E-007	.000	.339	3.803	.000
	BIR	.000	.000	-.106	-1.323	.188

CAR	.012	.017	.054	.683	.495
FDR	.005	.015	.031	.348	.728

a. Dependent Variable: NPF

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Analisis dan kesimpulan dari Tabel 4 di atas:

- a. Variabel JUB mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 3,803 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9770 atau nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti  $H_0$  tidak dapat diterima (ditolak) dan  $H_a$  dapat diterima (tidak dapat ditolak). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel JUB berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NPF.
- b. Variabel BIR mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 1,323 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9770 atau nilai Sig. sebesar 0,188 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  dapat diterima (tidak dapat ditolak) dan  $H_a$  tidak dapat diterima (ditolak). Dari arah hubungan, variabel BIR memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel NPF. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel BIR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.
- c. Variabel CAR mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,683 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9770 atau nilai Sig. sebesar 0,495 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  dapat diterima (tidak dapat ditolak) dan  $H_a$  tidak dapat diterima (ditolak). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.
- d. Variabel FDR mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 0,348 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9770 atau nilai Sig. sebesar 0,728 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  dapat diterima (tidak dapat ditolak) dan  $H_a$  tidak dapat diterima (ditolak). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.

### Uji Arti Ekonomi

Dengan melihat hasil uji  $t$ , interpretasi dari persamaan regresi linier berganda ini adalah:

$$NPF = 2,119 + 4,213E-007JUB + 0,000BIR + 0,012CAR + 0,005FDR$$

- a. Konstanta 2,119 menunjukkan jika variabel JUB, variabel BI Rate, variabel CAR dan variabel FDR konstan, maka variabel NPF sebesar

2,119 yang bermakna NPF perbankan syariah meningkat sebesar 2,119%. Oleh Bank Indonesia, NPF disyaratkan minimal 5 persen. Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) disebut NPF yang di perbankan konvensional sering disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadikan salah satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam mengelola penyaluran pembiayaannya. Meskipun pengaturan manajemen risiko perbankan syariah sedikit terlambat dibandingkan dengan pengaturan manajemen risiko perbankan konvensional yang telah dimulai pengaturannya sejak tahun 2003 yang merupakan implikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip manajemen risiko sebagai bagian manajemen perbankan syariah. Pada tanggal 02 November 2011, Bank Indonesia resmi mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bagi bank pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau di atas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya. Sebab, adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*), khususnya perbankan syariah. Oleh karena itulah, menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat pembiayaan bermasalah merupakan hal penting dan substansial tidak sehatnya perbankan syariah.

- b. Variabel JUB di masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yakni uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2). M1 terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat (tidak termasuk uang kartal di bank) ditambah dengan uang giral. M2 merupakan penjumlahan

M1 dengan tabungan dan deposito berjangka atau disebut uang kuasi. Angka pada koefisien regresi variabel JUB sebesar  $4,213E-007$  memberikan makna bahwa bertambahnya JUB sebesar Rp 1, perbankan syariah cenderung sensitif menekan risiko NPF sebesar Rp  $4,213E-007$ . Oleh karenanya, pengaruh JUB terhadap NPF adalah melalui inflasi. Dengan demikian, jika semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan tingkat inflasi yang tinggi dapat memperlambat perekonomian yang akhirnya mempengaruhi risiko dunia usaha sektor rill. Jika terdapat kenaikan inflasi yang tidak terduga, maka akan menyebabkan risiko daya beli, yakni nilai riil dari uang yang dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan. Tentunya juga akan berpengaruh pada sektor keuangan baik pasar modal maupun perbankan berakibat peningkatan risiko yang dihadapi industri perbankan syariah adalah peningkatan risiko NPF dengan catatan sesuai ceteris paribus. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maya Panorama (2016). Namun, hasil penelitian ini tidak didukung penelitian Ubaidillah (2016), Sumarlin (2016), Ningsukma Hakiim dan Haqiqi Rafsanjani (2016), Lemiyana dan Erdah Litriani (2016), Muhammad Yusuf Wibisono dan Salamah Wahyuni (2017) dan Husein Fajri Muttaqin (2017).

- c. Variabel *BI Rate* yang merupakan suku bunga acuan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter. Perbankan syariah merupakan bank yang mengedepankan prinsip Islam yang salah satunya dengan meniadakan sistem bunga. Angka pada koefisien regresi variabel *BI Rate* sebesar 0,000 memberikan makna bahwa dengan stabilnya *BI Rate* sebesar 1% berdampak perbankan syariah dapat menjaga kestabilan risiko NPF sebesar 0,000%. *BI Rate* dalam perbankan syariah berperan sebagai pembanding. Jika *BI Rate* naik, maka terjadi peningkatan daya saing perbankan syariah di mana nisbah bagi hasil perbankan syariah (*profit/loss sharing*) mampu bersaing dengan tingkat bunga pinjaman perbankan konvensional yang meningkat. Dengan kata lain, dengan adanya peningkatan *BI Rate*, produk pembiayaan oleh perbankan syariah akan semakin kompetitif. Margin atau nisbah bagi hasil perbankan syariah

yang ditentukan oleh kapasitas usaha atau laba/rugi nasabah tidak dapat naik begitu saja dikarenakan margin tersebut akan lebih bersaing terhadap suku bunga kredit perbankan konvensional. Jika *BI Rate* turun, maka margin perbankan syariah menjadi lebih tinggi dari suku bunga perbankan konvensional. Hal ini berdampak pada beralihnya nasabah perbankan syariah ke perbankan konvensional, sehingga penurunan *BI Rate* akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dengan catatan sesuai ceteris paribus. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Metin Vatansever dan Ali Hepşen (2013), Setyaningsih et. al (2015) dan Dwi Caesar Nawawi Syahid (2016). Namun, hasil penelitian ini tidak didukung penelitian Annisa Kurniasih Fauziyah (2015), Amri dan Rahma Harianti (2016), Muhammad Arfan Harahap (2016), Indri Supriani dan Heri Sudarsono (2018) dan Amir Hamzah (2018).

- d. Variabel CAR yang merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Angka pada koefisien regresi variabel CAR sebesar 0,012 memberikan makna bahwa dengan meningkatnya kecukupan modal sebesar 1%, perbankan syariah mampu memenuhi pembiayaan dari aktiva yang mengandung risiko NPF sebesar 0,012% karena CAR juga berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Rasio CAR sebagai faktor kunci yang menentukan apakah modal hazard dapat dihindari atau tidak. Secara singkat bisa dikatakan besarnya rasio CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya. Oleh karenanya, semakin besar kualitas aktiva produktif (KAP) akan berdampak kepada menurunnya tingkat rasio NPF. CAR sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Itulah sebabnya, rasio CAR bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi, seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan berdampak pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah bermasalah (macet) dengan catatan

sesuai *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Adhistry Riski Bestari dan Abdul Rohman (2013), Dinnul Alfian Akbar (2016), Gambo et al. (2017), Tri Wahyuni (2018) dan Juwita Permata Dewi (2018). Namun, hasil penelitian ini tidak didukung penelitian Putri Mardiani (2013), Siti Raysa (2014), Yunia Nugraini (2014), Rika Lidyah (2016) dan Irma Safitri et al. (2016).

- e. Variabel FDR yang merupakan rasio pembiayaan terhadap DPK adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dengan DPK yang berhasil dihimpun oleh bank. Angka pada koefisien regresi variabel FDR sebesar 0,005 memberikan makna bahwa dengan meningkatnya rasio FDR sebesar 1%, DPK terserap semua ke pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi lambat laun dapat menurunkan kualitas dari pembiayaan tersebut sebesar 0,005% karena dari segi kuantitas, jika semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan, maka risiko NPF menjadi lebih besar. Jadinya, jika dana yang disalurkan untuk membiayai pembiayaan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah juga semakin besar. Rasio FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan DPK. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). DPK yang dimaksud, seperti giro, tabungan dan dana deposito (tidak termasuk antarbank). Perhitungan FDR sendiri merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan likuiditas bank saat terjadi penarikan dalam jumlah besar. Rasio FDR pun digunakan untuk mengukur sejauh mana dana peminjam yang berhasil dihimpun oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari DPK dengan catatan sesuai *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mia Maraya Auliani dan Syaichu (2016), Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi (2015), Mares Ana Suci Popita (2013) dan Ratna dan Pani Akhiruddin Siregar (2018). Namun, hasil penelitian ini tidak didukung penelitian Yunis Rahmawulan (2008), Sri Wahyuni Asnaini (2014), Firmansari dan Suprayogi (2015), Havidz dan Setiawan (2015) dan Alissanda (2015).

## **Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan penulis dalam penelitian ini. Pertama, model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; Kedua, variabel JUB berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NPF; variabel BIR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF; variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.

Perbankan syariah perlu mengatur strategi agar tingkat NPF tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Risiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, sehingga bank perlu tetap mengelola eksposur risiko pembiayaan pada tingkat yang memadai. Hal ini diperlukan karena dalam menjalankan bisnis perbankan penuh dengan risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya, jika NPF tidak dikelola secara efektif, maka akan mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh Bank Indonesia, NPF disyaratkan minimal 5 persen.

## **Daftar Pustaka**

- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1996.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, LPFE-UI, Jakarta, edisi ke-5, 2005.
- Fadli Ferdiansyah, *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M1), Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Suku Bunga Deposito Terhadap Tingkat Inflasi*, Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011.
- Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, edisi revisi, cetakan ke-12, 2014.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Lilik Salamah, *Lingkar Krisis Ekonomi Indonesia*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th. XIV, No. 2, April 2001.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.  
Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso, *Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor Riil*, Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 1998.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku tanggal 02 November 2011.

Rika Lidyah, *Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal I-Finance, Vol. 2, No. 1, Juli 2016.

Situs resmi Bank Indonesia di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Situs resmi Otoritas Jasa Keuangan di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Slamet Riyadi, *Banking Asset & Liability Management*, LPFE-UI, Jakarta, edisi ke-1, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Taswan, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, edisi 2, 2010.